

Pemkot Bogor tak Batasi Mobilitas di Jalan Meski Kasus Covid-19 Naik

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menilai kenaikan kasus positif Covid-19 di daerahnya tidak perlu diikuti kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat di jalan, cukup di area fasilitas publik dan layanan publik. Karena, menurut Pemkot Bogor, efek yang ditimbulkan lebih rendah dari varian-varian sebelumnya. "Kalau saya, tidak perlu ada pembatasan mobilitas lagi, tetapi proses yang menjadi penting," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat diwawancarai usai menghadiri acara pelantikan anggota Shaka Bhakti Husada di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sabtu (23/7).

Dedie menyatakan kenaikan kasus positif Covid-19 sudah diprediksi terjadi pada bulan Juli 2022. Faktor yang mempengaruhi antara lain proses keberangkatan haji yang menyebabkan orang-orang berkumpul saat itu, baik calon jamaah maupun keluarganya. Selanjutnya, aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah hampir kembali normal. Kota Bogor masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Bogor, terjadi peningkatan kasus harian dalam tiga hari terakhir. Pada Rabu (20/7), dilaporkan 70 kasus baru, Kamis (21/7) tercatat 95 kasus baru, dan Jumat (22/7) kembali naik dengan 117 kasus baru.

"Tapi begini, memang jumlah kasus naik. Tapi vitality rate

rendah. Kemudian durasi atau lama sakit mereka yang terpapar itu juga sangat singkat," ujarnya.

Menurut Dedie, yang terpenting saat ini mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk mengencakan vaksinasi penguat atau booster, karena saat ini capaian vaksinasi penguat Kota Bogor masih di bawah 50 persen, tepatnya 38,8 persen. Vaksinasi penguat diharapkan dapat mencegah masyarakat kembali terpapar Covid-19, khususnya varian baru BA.4 dan BA.5.

Pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat yang terbit pada 11 Juli 2022. Dedie mengungkapkan meskipun di Kota Bogor belum ada tes genom sekuens untuk memastikan varian Covid-19 baru, tetapi tren kasus di Jabodetabek selama ini selalu sejalan dengan data tren kasus yang ada di Pemerintah pusat.

"Tapi secara umum, kurang lebih ada di Jabodetabek dan di Pusat sama. Nah penanganannya seperti apa? Penanganannya seperti yang disampaikan oleh Presiden, sedapat mungkin pakai masker," ucapnya. Selain vaksinasi, kata Dedie, perlu kesadaran masyarakat untuk mengikuti anjuran Pemerintah menggunakan masker di dalam ruangan yang padat orang maupun di area fasilitas publik dan layanan publik. ● **gio**

DPRD Kab. Bandung Soroti Banyaknya Keluhan dari Pemohon PBG di DPUTR

SOREANG (IM)- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto mengatakan pihaknya mendapat banyak keluhan dari ratusan pemohon izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG) yang tak kunjung lolos verifikasi dan Bidang PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung. "Kami menerima banyak keluhan dari ratusan pemohon yang tertunda rekomendasi izinnya di DPUTR," kata Yanto, Minggu (24/7).

Terhambatnya rekomendasi PBG dari Dinas PUTR ini, kata Yanto, berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG. Ia meminta Dinas PUTR untuk segera melakukan pembenahan di Bidang PBG. Karena jika dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR, Zeis Zulfahza membantah jika pihaknya sengaja "mengendapkan" berkas milik para pemohon PBG. Karena sebenarnya, dalam pengajuan PBG itu ada proses verifikasi. Masalahnya, banyak pemohon PBG yang belum lolos verifikasi. Ini terjadi karena pemohon tidak melengkapi semua persyaratan seperti yang ditetapkan dalam SIMBG. Kata dia, hingga Jumat 22 Juli kemarin, terdapat 1.185 berkas pemohon PBG yang telah disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung tersebut sudah mendaftarkan ke SIMBG, untuk kemudian diverifikasi oleh DPUTR Kabupaten Bandung

guna mendapatkan rekomendasi.

"Jadi kalau ada pemohon yang belum lolos verifikasi, itu ranahnya dari pemohon. Kalau input data dari pemohon sudah lengkap dan lolos verifikasi biasa prosesnya hanya lima hari, karena sistemnya sudah online. Jadi bukan berarti berkas permohonan mereka mengendap di DPUTR," kata Zeis.

Untuk mempercepat pelayanan PBG ini, kata Zeis, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, gencar melakukan sosialisasi perizinan PBG. Khususnya kepada para pemohon. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial.

"Kami terus sosialisasikan kepada para pemohon mengenai perizinan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di laman www.simbg.pu.go.id. Selain sosialisasi melalui medsos maupun offline atau tatap muka, kami juga sudah menyiapkan ruang Sekretariat SIMBG dan Tim Profesi Ahli (TPA) untuk berkonsultasi," ujarnya.

Zeis melanjutkan, pihaknya gencar lagi melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada para pemohon untuk berkonsultasi dengan narasumber dari stakeholder terkait. "Para pemohon bisa berkonsultasi langsung ke Sekretariat SIMBG Kabupaten Bandung. Bisa online melalui linktree/WA bisnis melalui akun IG DPUTR Kabupaten Bandung. Bisa juga secara offline dengan datang langsung ke Sekretariat SIMBG DPUTR Kabupaten Bandung di Kantor DPUTR Kabupaten Bandung," katanya. ● **pur**



PERINGATAN HARI BMX SEDUNIA

Peserta unjuk gaya bebas saat peringatan Hari BMX Sedunia di Progressive Bike Park, Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/7). Ratusan pesepeda BMX dari berbagai kota di Jawa Barat dan Jakarta hingga Bali mengikuti peringatan Hari BMX Sedunia yang dimulai dengan konvoi BMX bersama serta unjuk kemahiran dan parade kostum unik.

TPA SARIMUKTI BAKAL DITUTUP

DLH KBB Keluhkan Jika Harus Buang Sampah ke TPPAS Legok Nangka

NGAMPRAH (IM)- Penuh TPA Sarimukti yang rencananya bakal dilakukan pada 2023 mendatangi membuat Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak memiliki pilihan lain selain membuang sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung. Kendati demikian, tak semua sampah dibuang ke TPPAS Legok Nangka. Dari sekitar 150 ton per hari produksi sampah KBB, hanya 75 ton yang bakal dibuang ke Legok Nangka.

Staf Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rudi Huntadi mengatakan, usai TPA Sarimukti ditutup pada 2023, memang pilihan sampah harus dibuang ke TPPAS Legok Nangka. "Banyak faktor yang menyebabkan kami membatasi pembuangan sampah ke Legok Nangka, di antaranya biaya operasional atau transportasi yang mahal ditambah besarnya

tiping fee yang harus dibayarkan kepada pihak pengelola TPPAS," katanya kepada wartawan.

Ia menyebut, tipping fee yang harus dibayar mencapai Rp380 ribu per ton, berkali-kali lipat dari TPA Sarimukti yang hanya sebesar Rp 50 ribu per ton. "Yang dibayarkan itu setelah mendapat subsidi dari Pemprov Jabar sebesar Rp170 ribu per ton," sebutnya.

Menurutnya, biaya BBM yang harus dikeluarkan juga dipastikan naik berkali-kali lipat dibandingkan jika membuang ke Sarimukti. "Hal yang mesti menjadi perhatian lagi menyangkut kondisi armada truk," tuturnya.

Selain itu, sambung dia, kondisi medan jalan yang berat belum tentu dapat dilalui sejumlah truk sampah milik Pemkab Bandung Barat. "Paling tidak, truk yang mengangkut sampah ke Legok Nangka tahun pembuatannya di atas 2010. Sekarang saja dari 41 armada, 3 kendaraan sering kali mogok sehingga jarang lagi digunakan," tukasnya. ● **pur**

8 | Nusantara



SOSIALISASI ANTI KEJAHATAN SEKSUAL DI KERETA API

Komunitas pecinta kereta api Rail Fans membawa poster saat mengikuti sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (24/7). Sosialisasi itu guna memberikan edukasi kepada pengguna masyarakat khususnya penumpang perempuan untuk melaporkan segera ke petugas apabila mengalami pelecehan seksual sekaligus menolak para pelaku aksi kekerasan seksual untuk menggunakan kereta api.

Iwan Setiawan Salurkan Anggaran Samisade Sebesar Rp395 Milyar

Tahun ini anggaran Samisade meningkat menjadi sebesar Rp 395 milyar. Karenanya, kami minta para Pemdes menggunakannya secara rasional, terukur dan tidak dipaksakan atau sudah direncanakan sebelumnya, tegas Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

BABAKAN MADANG (IM)-Di acara Jambor Kades seKabupaten Bogor di Desa Pelangi Villa, Restoran Offroad

Jambore Kades Dorong Terciptanya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera

BOGOR (IM)- Pemerintah Pusat berharap kegiatan Jambore Kades tahun 2022 menjadi momentum dalam melahirkan dan mendorong desa di seluruh Kabupaten Bogor menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, diwakili Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Averies S. Fudhal, pada kegiatan Jambore Kades salah satu kegiatan edukatif di alam terbuka bentuk perkemahan besar sebagai sarana pembinaan, bertujuan untuk pengembangan diri sosial budaya dan intelektual.

Pembukaan Jambore Kades Tahun 2022 dilaksanakan di Bukit Pelangi Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7). "Kegiatan ini merupakan pertemuan kades sekaligus menjadi upaya keberpihakan pemerintah baik Provinsi Jabar dan Kabupaten Bogor terhadap desa se-Kabupaten Bogor," tegas Averies S Fudhal.

"Saya berharap asosiasi ini dapat berperan aktif dalam mendorong anggotanya untuk membangun sinergitas sebagai upaya perpaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa," pintanya.

Dalam kesempatan ini, ia meminta kepada seluruh Kades agar selalu taat aturan, senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam memimpin desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang mampu melahirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

"Serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan terutama ditengah dampak Covid-19 selama 2 tahun," tukasnya.

Selanjutnya, mewakili Menteri Desa PDTT, Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Pedesaan, Hadi Sulistyio mengungkapkan bahwa seluruh kepala desa harus mendorong desanya menjadi desa yang mandiri, agar stimulasi dalam regulasi pun bisa mendorong untuk program-program yang mendukung pembangunan desa.

"Kita juga akan mendorong apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat desa juga para kepala desa. Untuk itu kami harap para kepala desa juga bisa memberikan masukan bukan hanya aspirasi, karena masukan itulah yang dapat membantu kami dalam proses pengambilan regulasi kesjahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana prasarana desa," ungkapnya.

Termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA bagi lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya, karena telah diberi wewenang untuk mengurus wilayah pedes yang melaksanakan tugas pembangunan pelayanan kepada masyarakat.

publik yang efektif dan efisien.

"Saya berharap asosiasi ini dapat berperan aktif dalam mendorong anggotanya untuk membangun sinergitas sebagai upaya perpaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa," pintanya.

Dalam kesempatan ini, ia meminta kepada seluruh Kades agar selalu taat aturan, senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam memimpin desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang mampu melahirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

"Serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan terutama ditengah dampak Covid-19 selama 2 tahun," tukasnya.

Selanjutnya, mewakili Menteri Desa PDTT, Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Pedesaan, Hadi Sulistyio mengungkapkan bahwa seluruh kepala desa harus mendorong desanya menjadi desa yang mandiri, agar stimulasi dalam regulasi pun bisa mendorong untuk program-program yang mendukung pembangunan desa.

"Kita juga akan mendorong apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat desa juga para kepala desa. Untuk itu kami harap para kepala desa juga bisa memberikan masukan bukan hanya aspirasi, karena masukan itulah yang dapat membantu kami dalam proses pengambilan regulasi kesjahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana prasarana desa," ungkapnya.

Termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA bagi lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya, karena telah diberi wewenang untuk mengurus wilayah pedes yang melaksanakan tugas pembangunan pelayanan kepada masyarakat.



POCARI SWEAT RUN INDONESIA

Peserta melintasi Jembatan Mochtar Kusumaatmadja saat mengikuti Pocari Sweat Run Indonesia 2022 di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/7). Pocari Sweat Run Indonesia 2022 tersebut diikuti secara serentak oleh 5.000 peserta dari 167 kota yang berlari secara luring di Kota Bandung dan 13.601 peserta di 311 kota seluruh Indonesia yang berlari secara daring.

Land, Babakan Madang. Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan akan melanjutkan program satu milyar satu desa (Samisade).

"Pemkab Bogor akan melanjutkan program Samisade, namun setelah revisi peraturan Bupati (Perbup) Bogor tentang bantuan keuangan infrastruktur desa disetujui Kementerian Dalam Negeri, maka akan kami lanjutkan lagi program tersebut pada Bulan Agustus mendatang," tegas Plt Bupati Bogor Iwan

Setiawan kepada wartawan, Sabtu, (23/7).

Jika pada tahun anggaran 2021, Pemkab Bogor mengalokasikan Rp 319 milyar untuk program Samisade, di Tahun 2022, anggaran Samisade ditingkatkan menjadi Rp 395 milyar.

"Tahun ini anggaran Samisade meningkat menjadi sebesar Rp 395 milyar, kami minta para Pemdes menggunakannya secara rasional, terukur dan tidak dipaksakan atau sudah direncanakan se-

belumnya," tegas Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Politisi Partai Gerindra itu kembali mengingatkan bahwa aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan memonitor penggunaan anggaran Samisade. "Tidak hanya saat ini, saat diluncurkan pada tahun anggaran 2021 lalu, aparat hukum maupun forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) lainnya, terus melakukan pengawasan (penggunaan anggaran Samisade)," sambungnya. ● **gio**

Plt Bupati Bogor Minta IPHI Berperan Optimal



BOGOR (IM) - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), agar berperan optimal dalam implementasi haji mabrur di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikatakannya pada pelantikan Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Bogor periode 2022-2027, di Bigland Hotel Sentul, Sabtu (23/7).

"Saya minta IPHI dapat semakin optimal dalam memotivasi dan memberdayakan pra haji maupun pasca haji serta meningkatkan implementasi haji mabrur di tengah-tengah masyarakat sehingga tercapai kondisi umat yang sejahtera lahir dan batin," ungkap Iwan.

Iwan Setiawan juga mengucapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan selamat kepada para pengurus daerah IPHI Kabupaten Bogor periode 2022-2027 yang telah dilantik.

"Pengurus yang baru dilantik harus mampu mengemban amanah memajukan IPHI sebagai wadah yang memberdayakan para haji dalam melestarikan kemaburuan hajinya menjadi teladan, panutan dan pilar peningkatan kualitas umat dan bangsa Indonesia," terang Iwan.

Sementara itu KH. Subendra didapuk menjadi Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Bogor periode 2022-2027. Ia terpilih melalui Musyawarah Daerah IPHI Kabupaten Bogor yang juga dihadiri Ketua IPHI Jawa Barat, H. Ijang Faisal, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Pengurus Forum KBIH Kabupaten Bogor, Pengurus Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah.

"Kegiatan musyawarah daerah ini tentunya menjadi sarana silaturahmi sekaligus refleksi, evaluasi dan merencanakan kinerja pengurus IPHI kedepan, agar peran IPHI dapat semakin optimal," kata Iwan.

Ketua Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Bogor, KH. Lesmana mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor dalam hal ini Plt. Bupati Bogor atas dukungannya. Juga kepada Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Barat atas arahan dan bimbingannya," tutur KH. Lesmana. ● **gio**

Pemkot Medan Dukung Rencana Kantor Pos Medan Jadi Pos Bloc

MEDAN (IM)- Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan Pos Bloc Medan dapat menampung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan binaan Pemerintah Kota Medan.

"Kalau bisa ada dua atau tiga tenant (penyewa) berasal dari UMKM binaan Kota Medan. Untuk skema dan prosedurnya akan kami ikuti sesuai aturan yang berlaku," kata Bobby di Medan, Sabtu (23/7).

Dia menyebut, Pemerintah Kota Medan mendukung penuh rencana PT Pos Indonesia (Persero) yang akan menjadikan Kantor Pos Medan sebagai Pos Bloc Medan. Selain menjadi ruang kreativitas kalangan anak muda untuk berkreasi, Pos Bloc Medan juga menyediakan berbagai bentuk usaha baik kuliner maupun produk kreatif yang bisa dinikmati masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.

Data Dinas Koperasi UKM Kota Medan menyebut, jumlah UMKM di daerah ini sebanyak 27.753 unit terdiri atas usaha mikro 22.213 unit, usaha kecil 5.447 unit, dan usaha menengah 103 unit. "Ini merupakan bentuk PT Pos Indonesia kolaborasi agar UMKM yang masuk binaan Pemkot Medan bisa mempromosikan produknya di Pos Bloc," kata Bobby.

Dirut PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi melaporkan progres pembangunan Pos Bloc Medan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Faizal melanjutkan, tepat pada 17 Agustus 2022 akan dilakukan peluncuran yang dirangkaikan dengan bazar, penampilan musik dan lain sebagainya. "Kami berharap pak wala kota bisa hadir memberikan kata sambutan pada peluncuran itu. Mudah-mudahan Pos Bloc Medan ini menjadi ikon Kota Medan kedepan," kata Faizal. ● **pra**